

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTRAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT 1**

***THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND THE NUMBER OF INDIVIDUAL TAX PAYER
TOWARDS PERSONAL INCOME TAX REVENUES CASE STUDY OF DIRECTORATE GENERAL OF
TAXATION WESTERN JAVA 1***

Yusrina Suhada¹, Dudi Pratomo²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

[1yusrinasuhada@students.telkomuniversity.ac.id](mailto:yusrinasuhada@students.telkomuniversity.ac.id), [2dudipratomo@telkomuniversity.ac.id](mailto:dudipratomo@telkomuniversity.ac.id)

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi studi kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat Periode Tahun 2010 – 2013

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Variabel Independen dan Variabel Dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio.. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji f untuk pengujian secara simultan dan uji t untuk pengujian secara parsial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2010-2013. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state that is enforceable under the laws without getting rewarded directly. Without the tax , most state activities difficult. Taxes are used to finance state expenditures related to the process of government .

Taxes are the main source of state revenue in addition to revenues from oil and non -oil sources . With such a position he tax is a strategic source of revenue which must be managed well in order to finance the country can be run in accordance with its planning .

This study aimed to analyze the effect of economic growth and the amount of individual taxpayer to the Revenue Tax Personal case study at the Regional Office of Directorate General of Taxes, West Java 1 and BPS West Java Period 2010-2013.

The data used is secondary data. Independent variables and Dependent variables in this study was measured using the scale ratio. Data analysis method used is multiple linear regression analysis, F test for the simultaneous testing and t test for partial testing.

These results indicate that simultaneously there is no influence economic growth and the number of individual taxpayers for personal income tax revenue 2010-2013. While the partial results of the analysis result is

that economic growth has no significant effect on personal income tax revenue and the number of individual taxpayers has no significant effect on personal income tax revenue.

Keywords: Economic Growth, The number of the individual taxpayer, Revenue Personal Income Tax.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan. Selain itu, pajak juga digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan. Target penerimaan pajak akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terkait fungsi dan peranan pajak yang semakin penting dan strategis, terutama pada saat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil.

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat. PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 miliar (US\$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US\$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas 4,91 persen termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US\$1 = Rp. 8.500,-).

Terganggunya penerimaan pajak akan mempengaruhi tiga aspek penting secara terintegrasi, yaitu: ekonomi, politik dan sosial (Eddy Wahyudi, dkk., 2009:69). Dengan demikian kinerja penerimaan pajak sangat tergantung dari aktifitas bisnis yang ada. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimaksud. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam perkembangannya, kontribusi penerimaan negara yang berasal dari “dalam” terus diharapkan dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2012) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai Pertumbuhan dari pendapatan nasional yang terjadi di suatu negara dari satu tahun ke tahun lainnya. Menurut Erni Umi Hasanah dan Danang sunyoto (2012) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Simon Kuznets (2007), Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting untuk suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah atau wilayah yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu. Secara kuantitatif PDRB adalah nilai barang dan jasa.

PDRB dibedakan dalam dua bentuk perhitungan yaitu PDRB atas harga berlaku (at current price) dan PDRB atas dasar harga konstan (at constant price). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menangkap perubahan dalam struktur ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil.

2.2 Teori Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

2.3 Teori Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2007. Pajak penghasilan digolongkan sebagai pajak langsung, dimana beban pajak tersebut ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Menurut sifatnya, pajak penghasilan digolongkan dalam pajak subjektif yaitu dalam pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada subjeknya, jika tidak ada subjek pajaknya maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

3. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan dimana jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pun akan meningkat. Didorong oleh penelitian Wenni Rismawati (2013) koefisien yang positif menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan Pajak Penghasilan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menaikkan pendapatan per kapita, dimana kenaikan pendapatan per kapita masyarakat akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara, khususnya Pajak Penghasilan.

3.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Jumlah wajib pajak berbanding lurus dengan penerimaan pph dimana jika penambahan jumlah wajib pajak setiap tahunnya mendorong kenaikan atau peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini didorong oleh penelitian Rima (2013), menyatakan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak sangat mendukung penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Hubungan jumlah pajak dinyatakan sangat kuat, hubungan ini menunjukkan semakin besar jumlah wajib pajak, maka semakin besar jumlah penerimaan PPh.

3.3 Hipotesis

- Ha1: Perubahan Pertumbuhan dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh positif secara simultan terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.
- Ha2: Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.
- Ha3: Perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat 1.

Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *Sampling Purposive* Menurut Sugiyono (2010:68) *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 yang terdiri dari 15 Kantor Pelayanan Pajak dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat 1 tahun anggaran 2010-2013.

4.2 Variabel Operasional

Tabel 1
Variabel Operasional

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1 Pertumbuhan Ekonomi (X ₁)	Laporan Hasil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta	Pertumbuhan Ekonomi = $\frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{(PDRB_{t-1})} \times 100\%$	Rasio
2 Perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X ₂)	Jumlah Wajib Pajak adalah jumlah total dari orang pribadi yang menurut ketentuan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. (Lainutu:2013)	$\frac{(\text{Jumlah WP } OP_{t1} - \text{Jumlah WP } OP_{t-1})}{\text{Jumlah WP } OP_{t-1}}$	Rasio
3 Perubahan Penerimaan Jumlah Pajak Penghasilan (Y ₁)	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007:325)	$\frac{(\text{Penerimaan PPH}_t - \text{Penerimaan PPH}_{t-1})}{\text{Penerimaan PPH}_{t-1}}$	Rasio

Sumber : Data sekunder diolah penulis

4.3 Teknik Analisis Data

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013:96). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X₁) dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X₂) terhadap satu variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Dengan demikian, regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan
- a = Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah nol (X₁, X₂=0)
- b₁, b₂ = Koefisien regresi
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₂ = Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
- e = *Standard Error*

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisa Deskriptif

Hasil statistic deskriptif dalam penelitian ini tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan_Ekonomi	44	7.20	17.18	11.9702	2.79557
Jumlah_WP_OP	44	1.38	50.81	11.2348	8.88876
Penerimaan_PPh	44	-15.59	56.16	16.0570	14.62253
Valid N (listwise)	44				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015)

- Nilai rata-rata dari Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2010 hingga 2013 adalah 11,9702 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi nilainya sebesar 17,18. Pertumbuhan Ekonomi terendah dengan nilai 7,2.
- Nilai rata-rata (mean) dari Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 11,2348 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi dengan nilai 50,81. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah dengan nilai 1,38.
- Nilai rata-rata (mean) dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah 16,0570 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tertinggi dengan nilai 56,16. Penghasilan Orang Pribadi terendah dengan nilai -15,59.

5.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data residual terdistribusi normal. Terdapat pada lampiran.

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tolerance dari variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,783 dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 0,783. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,1 yang menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Nilai *variance inflation factor* (VIF) pada variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah 1,277 dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 1,277. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) yang lebih kecil dari 10 maka variabel ini tidak ada multikolinieritas. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) pada variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa pada variabel tersebut tidak ada multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan terjadi homokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan masukan variabel independen Pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak orang pribadi

4) Uji Autokolerasi

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai DW 1,778, selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai table signifikansi 5%, jumlah sampel N=44 dan jumlah variable independen 2 (K=2) = 2,44 maka diperoleh nilai 1,6120. Nilai DW 1,778 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,6120 dan kurang dari (4-du) 4-1,6120 = 2,3880 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

5.3 Pembahasan

Untuk menguji hipotesis didasarkan pada tabel *Coefficients* yang disajikan pada tabel 4.10. Berdasarkan tabel 4.10, maka beta dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yaitu $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ Sehingga akan didapatkan persamaan :

$$Penerimaan = Y = 1,035 + 0,995 X_1 + 0,277X_2 + e$$

Setelah model regresi diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui signifikan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil pengujian ini dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel 4.11, nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 0,737 dan $Sig. = 0.485$. Penelitian ini memiliki nilai $n = 44$ dan $k = 2$, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,23. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} = 0,737 < F_{tabel} = 3,23$ dan nilai probabilitas $= 0.737 > \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

5.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Uji hipotesis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.097 < 2.01808$) dengan nilai signifikansi $0.279 > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi. Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

5.3.3 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Uji hipotesis pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,97 > 2,01808$), dengan nilai signifikansi $0,338 > 0,05$. Maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan antara variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- 2) Berdasarkan uji hipotesis parsial
 - a. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Karena, belum tentu dengan adanya Pertumbuhan Ekonomi setiap tahunnya dari tahun 2010-2013 akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
 - b. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Karena, belum tentu dengan adanya Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya dari tahun 2010-2013, seluruh tambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut membayar pajaknya pada tahun 2010-2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Erni Umi Hasanah dan Danang Sunyoto. (2012). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Capstone
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lainutu, Amina (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan PPH 21 pada KPP Pratama Manado. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sadono, Sukirno. (2012). Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi 3) : Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss) .
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan